

PERKEMBANGAN SIARAN PERTELEVISIAN BAGI MASYARAKAT PADA ZAMAN ORDE BARU

Chindy Norma Putri
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
e-mail: chindymahkota63@students.unnes.ac.id

Abstrak- Penelitian ini bertujuan mengkaji pola politik yang tersirat dalam siaran pertelevisian pada zaman orde baru. Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimanakah acara televisi yang disiarkan pada zaman orde baru?, dan (2) bagaimanakah perbedaan mengenai pola politik yang tersirat dalam masa orde baru dengan masa reformasi? Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian histori. Fokus penelitian ini adalah acara pertelevisian yang disiarkan pada zaman orde baru, politik yang tersirat dalam acara siaran televisi, dan perbandingan politik yang tersirat dalam televisi zaman orde baru dengan kabinet Indonesia maju. Analisis data menggunakan analisis data dari model Spradley. Simpulan menunjukkan bahwa perkembangan acara pertelevisian zaman orde baru dengan kabinet Indonesia maju dalam bidang politik tidaklah memiliki sistem yang sama. Acara televisi pada zaman orde baru cenderung mendoktrin kehebatan Presiden Soeharto pada saat masih menjabat sedangkan masa kini cenderung netral dan tidak memiliki acara televisi khusus untuk penyiaran Presiden.

Kata kunci: *Televisi, Orde Baru, Masyarakat.*

THE DEVELOPMENT OF TELEVISION BROADCASTING FOR SOCIETY IN THE NEW ORDER AGE

Chindy Norma Putri
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
e-mail: chindymahkota63@students.unnes.ac.id

Abstract- *This research was aimed to examine the political patterns implied in television broadcasts in the New Order era. The research problem is formulated as follows: (1) how were television programs broadcast during the New Order era?, and (2) what are the differences regarding the political patterns implied in the New Order era and the reformation period? The approach used in this research is qualitative with the type of historical research. The focus of this research is on television programs broadcast in the New Order era, politics implied in television broadcasts, and political comparisons implied in television during the New Order era with the advanced Indonesian cabinet. Data analysis used data analysis from the Spradley model. The conclusion shows that the development of television shows during the New Order era with the advanced Indonesian cabinet in the political field did not have the same system. Television programs in the New Order era tended to indoctrinate the greatness of President Soeharto when he was still in office, while today they tend to be neutral and do not have special television programs for broadcasting the President.*

Keywords: *Television, New Order, Society.*

Pendahuluan

Selama 77 tahun Indonesia menjadi Negara yang merdeka, Indonesia sudah melewati 7 masa kepemimpinan yang dipimpin oleh Presiden. Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2008, tercantum bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara efektif, dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masa jabatan kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya hanya berlangsung selama 5 tahun yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia tahun 1945 pasal 7 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Maksimal dalam memimpin Presiden adalah 10 tahun masa jabatan tetapi Indonesia memiliki Presiden dengan masa jabatan terlama, yakni Presiden Soeharto dengan masa menjabat selama 32 tahun dari 1966-1998 sesuai dengan Tap MPR No. XXXIII/MPRS/1967 dan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966. Masa kepemimpinan Soeharto dinamakan dengan Orde Baru. Orde Baru ditetapkan setelah runtuhnya masa kepemimpinan Soekarno dengan masa nya yang dinamakan Orde Lama.

Secara ideal, Orde Baru memiliki prinsip mengembalikan nilai-nilai kehidupan masyarakat sebagai bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde baru dianggap sebagai penyempurnaan dari masa kepemimpinan sebelumnya, yakni Orde Lama. Orde Baru memiliki perkembangan yang kompleks, salah satunya adalah bidang penyiaran televisi.

Televisi merupakan bentuk dari teknologi berupa media massa yang menampilkan tampilan visual video (gambar dinamis) atau gambar (gambar statis) dan suara dalam bentuk kotak atau wadah yang berkesinambungan dengan sinyal satelit dan kabel. Televisi pertama kali diciptakan oleh John Logie Baird pada 13 Maret 1888. Pembuatan televisi karena terinspirasi dari maraknya radio pada saat itu. Televisi dianggap sebagai kemajuan peradaban manusia dan hiburan bagi masyarakat (Calabrich, 2016). Acara televisi memiliki jam tayang yang berbeda-beda sesuai dengan jam kegiatan manusia dan selaras dengan kebutuhan publik. Jenis acara televisi yang ditayangkan yakni berita, kartun, hiburan komedi, ritual tradisi agama, dan lain-lain. Bentuk televisi juga menyeimbangkan dengan zaman yang berlaku, pada masa orde baru televisi masih dalam bentuk televisi tabung. Televisi memiliki dampak positif dan negatif kita sebagai masyarakat Indonesia dapat lebih bijak menyaring siaran acara televisi baik untuk individu dan keluarga serta lingkungan. Komunikasi yang nyata dan efektif juga merupakan dampak dari adanya televisi. Kejadian seluruh dunia dapat disiarkan di televisi dan mudahnya informasi dari luar ke dalam negeri bahkan terjadinya proses globalisasi. Penyiaran TV dilakukan dengan memerlukan sinyal VHF dan UHF agar dapat memasuki acara televisi yang diinginkan. Berbeda dengan zaman sekarang yang menganggap televisi merupakan aksesoris perabotan rumah, sebelum reformasi terjadi, masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam menonton televisi. Beberapa Masyarakat masih menetapkan budaya menonton televisi bersama dengan warga atau di tempat perkumpulan masyarakat. Berbeda dengan masa kini cenderung menonton siaran melalui siaran langsung dalam gadget.

Masa Orde Baru masih jarang nya penduduk Indonesia yang memiliki televisi, karena harga yang cenderung mahal sehingga hanya beberapa warga saja yang sudah bisa memiliki televisi. Televisi pertama kali tayang di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1962. Acara yang disiarkan merupakan upacara bendera merah putih di Istana Negara dengan sebagai memperingati HUT kemerdekaan Indonesia. Menurut Tabrani, sejarah juga bisa menyangkut dengan televisi karena televisi memiliki data bertepatan dengan Hari Ulamg Tahun kemerdekaan Indonesia ke-17. Jam tayang yang disiarkan pada televisi tersebut dimulai dari jam 07.30 hingga pukul 11.02 siang pada waktu Indonesia barat. Televisi juga dapat dijadikan sumber sejarah, karena memiliki data dan bukti sumber nyata, yaitu berupa gambar dinamis maupun gambar statis (Tabrani, 1992).

Perkembangan zaman dengan teknologi mempengaruhi perkembangan televisi. Televisi disiarkan dengan kebutuhan masyarakat ataupun kepentingan golongan khusus. Masa Orde baru juga telah mengalami perkembangan acara televisi nasional maupun swasta. Menurut Hemanto, televisi kerap disalahgunakan untuk penyebaran manipulasi isu berupa visual supaya menarik

minat dari publik dengan tujuan mencapai kepentingan tertentu. (Hermanto, 2007). Maraknya kepentingan golongan tertentu di dalam acara televisi membuat hilangnya tujuan penyiaran untuk kebutuhan publik (Massa, 2022).

Perkembangan televisi dalam masa orde baru juga dianggap sebagai keterbukaan dengan publik. Sejatinya, media masa memberikan dampak pengaruh dibidang pengetahuan, penguatan sikap, keyakinan, dan predisposisi yang layak. Media massa juga mempengaruhi pemilihan dalam pemilihan umum pada orde baru. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dalam bentuk agenda setting, priming, dan framing dari siaran televisi atau media masa.

Berkembang dan majunya pertelevisian Indonesia pada masa orde baru, membuat perhatian kepada Soeharto sebagai presiden kedua di Indonesia untuk memanfaatkan siaran televisi sebagai alat penerangan. Siaran televisi yang digunakan pada Soerhato sebagai alat penerangan menggunakan siaran televisi TVRI. Pada siaran televisi TVRI, Soeharto mensosialisasikan seluruh kegiatannya kepada pengguna atau penonton siaran televisi tersebut. Tujuan dari program tersebut digunakan agar partai golongan GOLKAR dapat memenangkan suara lagi dalam pemilihan umum pada masa orde baru. Pada saat orde baru, siaran televisi TVRI hanya sebatas ditayangkan di pulau Jawa sekitar tahun 1970 an. Sekitar 90,81% penyiar televisi yang terdaftar berpesat pada tahun 1976 sekitar 700.000 yang tersebar ke seluruh Indonesia. Kemudian semakin meningkat pada tahun 1977 meningkat sebanyak 900.000 yang tersebar ke seluruh Indonesia.

Persebaran dari siaran televisi di Indonesia meningkat dari tahun 1975-1978. Di pulau Jawa terjadi peningkatan sampai sebesar 133%, di Provinsi Sumatera Utara meningkat sekitar 257%, di Provinsi Sumatera Barat meningkat hingga sebesar 235%, di Pulau Sulawesi terjadi peningkatan juga hingga sebesar 235%, dan di Pulau Kalimantan juga terjadi peningkatan hingga sebesar 165%. Sehingga dapat digeneralisasikan bahwa siaran televisi pada masa orde baru meningkat dan dimanfaatkan sebagai media politik presiden Soeharto pada masa itu.

Metode Penelitian

Sejarah merupakan sebuah ilmu yang membahas peristiwa masalah secara kronologis dan menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah ilmu. Metode sejarah adalah proses pengujian dan analisis dalam penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari metode sejarah sebagai pedoman dalam berlangsungnya pembuatan penelitian supaya dapat bersifat valid ujinitasnya. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian sejarah. Adapun rangkaian dari metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam metode penelitian sejarah, dalam tahap ini diperlukan mencari sumber-sumber atau data-data yang diperlukan sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Sumber-sumber sejarah diperlukan karena digunakan sebagai fondasi atau kerangka dari tema yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan dua jenis sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun penjelasan dari sumber primer dan sumber sekunder adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer (Pencarian Sumber)

Sumber primer merupakan sumber yang masih bersifat murni dari hasil pengamatan peristiwa tersebut. Sumber primer tidak bersifat perantara atau turun-temurun. Sumber primer terbagi menjadi dua jenis yaitu, sumber tertulis dan non-tertulis. Sumber tertulis bisa berupa dokumen, artefak, dan lain-lain. Sedangkan sumber tidak tertulis bisa berupa hasil wawancara yang dimana narasumbernya merupakan saksi atau pelaku dalam kejadian sejarah tersebut. Pada penelitian ini, akan menggunakan sumber primer yakni, Arsip Republik Indonesia (ANRI), seperti:

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 Tahun 1963, *Pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia*, 20 Oktober 1963.
- 2) Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Konsep Rencana Operasi Penerangan Pemilu 1977 : Hasil Seminar Intern Deppern*, Jakarta 17 Januari 1977.

- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 217 Tahun 1963, *Pengangkatan Anggota Direksi Yayasan Televisi Republik Indonesia*, 20 Oktober 1963.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang sudah bersifat ditulis ulang atau diceritakan lagi oleh seseorang. Sumber sekunder tidak sekuat dengan sumber primer mengenai kevaliditasnya. Sumber sekunder bisa berupa sahabat dari narasumber yang telah diberitahu atau kesaksian saksi yang tidak terjun ke dalam peristiwa sejarah tersebut. Buku merupakan salah satu dari bentuk sejarah sekunder. Adapun beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Massa, M. (2022). *Kajian Literasi Media Kiprah Pertelevisian Pasca Orde Baru dalam Perspektif Komunikasi Islam Media Literacy Study of Post-New Order Television Gait in Islamic Communication Perspective*. 5(1).
- 2) Faqihuddin, O., Utomo, A., Sejarah, P. I., Sejarah, J. P., & Ilmusosial, F. (1977). *TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEDIA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM 1977 TVRI AS A MEDIA FOR POLITICAL PROPAGANDA IN 1977 GENERAL ELECTION* Hermin Indah Wahyuni, *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Telev.* 178–191.
- 3) Hadi, D. W., & Kusuma, G. (2006). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Jurnal Sosioteknologi*, 1, 40–50.

2. **Verifikasi (Kritik Sumber)**

Verifikasi atau kritik sumber merupakan tahapan selanjutnya dari heuristik. Hal yang harus dilakukan dalam tahapan verifikasi adalah menganalisis atau menelaah dari sumber-sumber yang telah dipilih sebelumnya. Agar sumber yang digunakan dapat bersifat valid, setidaknya sumber tersebut dilakukan dua kali tahap pemeriksaan, adapun tahapan yang digunakan adalah kritik eksternal dan kritik internal.

Dalam kritik eksternal, memiliki tujuan yakni mencari keabsahan data-data dengan melakukan analisis secara kritis. Menurut Kuntowijoyo, kritik eksternal juga digunakan untuk menilai keabsahan data-data yang digunakan. Sumber tersebut dapat berupa jenis ekrtas, tinta, gaya tulisan, bahasa, dan kalimat yang digunakan untuk mengetahui keaslian dari sumber tersebut.

Sedangkan kritik internal, memiliki tujuan yaitu mencari keabsahan isi sumber-sumber tersebut. Perbedaannya dengan kritik ekstern adalah kritik intern memfokuskan kedalam isi sumber tersebut. Tujuan dari kritik internal adalah sebagai pembuktian kevaliditas mengenai kesaksian dan pernyataan sumber yang terdapat tersebut dapat divalidkan atau tidak. Tahapan yang dilakukan supaya mengetahui bahwa data tersebut valid adalah sebagai berikut:

- a. Telaah isi dari data-data tersebut yang terdapat pada catatan perjalanan pelaku atau saksi kejadian sejarah tersebut,
- b. Telaah sumber tersebut dapat dipercaya(jujur) atau tidak.

3. **Interpretasi (Penafsiran)**

Intepretasi atau penafsiran merupakan tahapan penafsiran dari fakta-fakta sejarah. Ada dua proses yang dapat dilakukan dalam penafsiran sumber, yaitu menggunakan model analisis dan menggunakan model sintesis.

4. **Historiografi (Penulisan)**

Dalam sejarah, historiografi merupakan tahapan akhir dari metode sejarah. Dalam tahap historiografi atau penulisan sejarah merupakan rekonstruksi dari masa lampau yang tersusun secara sistematis, jelas, dan sesuai kaidah sejarah yang disajikan dalam cerita sejarah. Historiografi mengarahkan pada penggunaan seluruh daya pikiran dan keterampilan teknis. Dalam historiografi menggunakan bentuk tulisan bersifat diakrinis. Diakrinis merupakan tahapan menjelaskan peristiwa dengan menggunakan kurun waktu tertentu. Dalam

penelitian juga memerhatikan disiplin ilmu sejarah yang memerhatikan batasan waktu dan tempat. Setelah memerhatikan disiplin ilmu sejarah juga harus menghasilkan sintesis dari keseluruhan penelitiannya atau penemuannya tersebut dalam sebuah penulisan yang utuh. Hal tersebut adalah maksud dari historiografi. Dalam penelitian ini, akan memfokuskan pada kajian sejarah Televisi Republik Indonesia sebagai media Orde Baru dan pola pikir politik yang tersirat dalam siaran televisi Indonesia pada saat Orde Baru.

Hasil dan Pembahasan

A. Siaran Acara Televisi pada Masa Orde Baru

Keadaan dalam siaran pertelevisian Indonesia dan media massa pada masa Orde Baru hidup di bawah tekanan pemimpin yang bahwasannya peran dan tatanan kekuasaan media termasuk acara televisi dalam lingkungan masyarakat ditandai dengan keluasan jangkauan, intuisi yang terpencil, individu yang berisolasi, serta kurangnya kemakmuran dan kesatuan dengan warga setempat. Akibat dari gejala tersebut, tak heran jika media massa termasuk acara televisi di Indonesia hendak sering dikendalikan atau dikuasai secara monopolistik yang dilakukan dengan tujuan sebagai alat peran utama yang efisien dan mudah dalam mengorganisasi kerumunan, seperti khalayak, pengguna, pasar, dan pemilih (Hadi & Kusuma, 2006).

Pada masa orde baru, melewati selama bertahun-tahun sekiranya hanya pernah ada satu siaran televisi yang aktif pada saat itu, yaitu dari acara siaran televisi TVRI yang dimana acara siaran televisi tersebut merupakan milik pemerintah. Sebelumnya, ide dari pendirian televisi di Indonesia sudah ada sejak zaman Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Namun pada saat itu diharapkan agar tujuan dibentuknya siaran televisi sebagai pengenalan jati diri bangsa Indonesia. Namun motif yang tersirat juga sama dengan Orde Baru, bahwa acara televisi yang bersiar di Indonesia dapat dijadikan sebagai sarana politik terutama dalam kampanye pemilihan umum atau pemilu. Ide tersebut merupakan saran dari Maladi yang disampaikan kepada presiden pertama yaitu Soekarno.

Pada tahun 1961, sekiranya sudah mulai adanya perkembangan dari siaran televisi di Indonesia. Bahkan sudah mempersiapkan panitia untuk mengelola siaran televisi di Indonesia seperti yang tercantum dalam keputusan menteri Penerangan dengan nomor 20/SK/ M/ 61 yang dikeluarkan pada 25 Juli 1961. Badan yang dibentuk sebagai pengelola siaran televisi di Indonesia adalah Yayasan Televisi Republik Indonesia. Keputusan tersebut sudah tercantum dalam Keputusan Presiden No.215 tahun 1963. Siaran pertama TVRI yang disiarkan ke massa adalah Upacara Hari Ulang Tahun atau HUT Replublik Indonesia ke-17 yang diliput di Istana Negara dan disambut hangat oleh presiden Indonesia. Dalam siaran TVRI atau Televisi rakyat Indonesia, hampir setiap harinya yang dimulai sejak 24 Agustus dengan waktu minimal setengah jam tayang, televisi yang disiarkan berupa peliputan peristiwa-peristiwa di Asian Games pada 1961. Dengan respon yang positif dan banyak yang tertarik untuk menonton acara TVRI, siaran acara tersebut kemudian menambah jam tayang dari peliputan Asian Games yang naik menjadi lima belas jam, kenaikan jam tayang tersebut dimulai sejak 1 September 1961.

Pada tahun 1963, sekiranya setelah mengalami perkembangan siaran televisi dari TVRI, acara siaran televisi tersebut juga pernah mengalami masa yang rumit. Kejadian tersebut diawali pada bulan Maret 1963. Hal tersebut karena banyaknya pihak yang mengajak kerjasama dalam iklan (PRAMESWARI, 2009). Dengan menambahnya pemasukan secara drastis dan pengelola alokasi dana juga kurang bisa mengelola keuangan tersebut. Sulitnya pengelolaan dan alokasi dana yang bersumber dari Yayasan Gelora Bung Karno, dengan maksud menjadikan TVRI sebagai Yayasan mandiri. Berdasarkan keputusan tersebut diambil dari keputusan Presiden No. 215 Tahun 1963, dari hasil keputusan tersebut yang menghasilkan terbentuknya Yayasan Televisi Replublik Indonesia. Berdasarkan keinginan presiden Soekarno, beliau mengharapkan bahwa TVRI atau Televisi Replublik Indonesia bisa menjadi revolusi spiritual dan jati diri Bangsa Indonesia yang bisa dikenalkan ke seluruh pengguna bahkan seluruh dunia. TVRI atau

Televisi Republik Indonesia juga memiliki hak istimewa karena sebagai satu-satunya televisi yang siar di Indonesia, TVRI memiliki hak untuk menentukan tipe alat-alat yang sudah masuk dan beredar di jangkauan Indonesia (6. *Televisi Komunitas, Media Pemberdayaan Masyarakat - Budhi Hermanto*, n.d.). Pada dasarnya, TVRI memiliki pandangan dengan tujuan menjadikan pelaksanaan pembangunan Negara baik itu mental, fisik dan mendorong masyarakat Indonesia menjadi warga yang sosialis (Alkhajar, 2011). Dengan memiliki tujuan tersebut, adapun langkah yang dilakukan oleh Televisi Republik Indonesia yaitu membuat beberapa program acara siaran dengan mencakup beberapa bidang kegemaran masyarakat, seperti dalam bidang keagamaan, keolahragaan, penerangan, pendidikan dan ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan, serta hubungan kerjasama kebudayaan yang dijalin dengan Negara lain.

Berbeda pada masa Orde Baru, menurut pandangan presiden kedua Soeharto dengan TVRI atau televisi Republik Indonesia diharapkan mampu menjadi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Adapun tiga harapan dari Soeharto dengan tujuannya TVRI atau televisi Republik Indonesia, yakni pertama, sebagai alat yang menjadi fondasi untuk dukungan persatuan dan kesatuan nasional, kedua, sebagai alat yang dijadikan dukungan untuk pembangunan nasional, dan ketiga, sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik Negara (Kurniady & Sazali, 2022). Pemerintah Indonesia juga mendukung dengan penyiaran televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagaimana sesuai dengan keputusan menteri Departemen Penerangan dengan keputusan surat No.54/B/KEP/MENPEN/1971 yang merupakan surat tentang Penyelenggaraan Siaran Televisi Indonesia. Keputusan tersebut berisikan bahwa dukungan kepada TVRI sebagai media yang mendukung segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Keputusan tersebut karena dilandasi dengan pendapat pemerintah bahwa menurutnya perkembangan acara televisi Indonesia kedepannya akan semakin berkembang pesat dan merata di wilayah Indonesia. Dengan keadaan tersebut, maka pemerintah Indonesia harus mempersiapkan segala resiko dan tantangan yang akan diterima dengan permasalahan tersebut. Siaran televisi yang bersifat integrasi merupakan solusi yang cocok dari permasalahan tersebut. Dalam siaran televisi TVRI juga memiliki beberapa pedoman atau aturan-aturan utama sebagai fondasi peraturan dalam penyiaran acara televisi tersebut. Diambil dari salah satu tujuan dari pembentukan TVRI atau televisi Republik Indonesia yang dimana tujuannya adalah sebagai media massa yang mendukung sepenuhnya dalam rangka pembangunan nasional. Maka untuk menunjang tujuan tersebut, ditinjau dari siarannya, Televisi Republik Indonesia atau TVRI harus dapat mengajak sesama masyarakat dengan saling memotivasi dengan semangat untuk mensukseskan kebijaksanaan dalam seluruh program pemerintah yang berlaku pada saat itu.

Selain mengajak masyarakat untuk memenuhi segala peraturan atau program pemerintah pada saat itu, TVRI setidaknya juga dapat menjadikan wadah dalam menampung ide terutama ide yang bersifat positif bagi pemerintah seperti, mengajak atau menciptakan semangat yang tinggi kepada masyarakat agar antusias menaati dan mengikuti segala program pemerintah. Namun disisi lain, TVRI atau Televisi Republik Indonesia juga mendapatkan larangan dari pemerintah yaitu larangan menyiarkan acara televisi yang dapat memicu perspektif buruk kepada masyarakat kepada pemerintah sehingga adanya penyaringan yang ketat dalam acara televisi tersebut untuk disiarkan kepada masyarakat Indonesia.

Larangan tersebut yang membuat statement muncul bahwa presiden kedua Rakyat Indonesia yakni Soeharto ingin menjadikan TVRI atau Televisi Republik Indonesia sebagai alat kepentingan politik pemerintah dalam pengambilan simpati kepada masyarakat dan pemilihan umum. Pemikiran lain yang juga muncul bahwa TVRI juga dijadikan wadah propaganda politik Negara dan dilarang keras dalam mengkritik pemerintah pada masa Orde Baru. Ketentuan selanjutnya mengenai acara program siaran televisi yang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Adapun enam program acara siaran televisi yang lolos uji dari hasil keputusan pemerintah Indonesia, yaitu acara pendidikan dan ilmu

pengetahuan, acara penerangan, acara khusus usia anak-anak, acara budaya, acara olahraga, dan acara hiburan yang layak.

Keputusan tersebut berdasarkan dari pemikiran pemerintah bahwa masyarakat atau penonton televisi acara tersebut hendaknya dijadikan sebagai massa yang harus diberi penerangan. Dengan adanya pemikiran tersebut, dari TVRI diharapkan dapat dilaksanakannya keputusan tersebut melalui siarannya dengan program acara siaran berita penerangan. Berita penerangan merupakan program yang secara garis besar berisi tentang penjelasan mengenai seluruh program pemerintah. Program ini diprioritaskan oleh pemerintah dan ditayangkan dengan waktu tayang yang sering. Program acara penerangan bisa dijadikan sebagai bukti bahwa TVRI atau televisi replublik Indonesia mengandung propaganda dan menarik simpati penonton kepada pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1977, keadaan politik pada saat itu belum ada perubahan yang signifikan bagi sosial, kemudian Deppen membuat sebuah rancangan aturan baru mengenai penarikan suara dalam pemilihan umum. Konsep yang dibuat Deppen merupakan Konsep Rencana Operasi Penerangan (Renopen) yang dilakukan untuk pemilihan umum atau pemilu. Rencana ini dianggap berpengaruh besar terhadap kekuasaan presiden Soeharto. Isi dari rencana tersebut berupa kumpulan strategi dalam mengamankan suara yang terkumpul dari pemilihan umum. Salah satu cara yang digunakan dalam salah satu strategi Konsep Rencana Operasi Penerangan atau Renopen untuk mengamankan suara yang dihasilkan dari pemilihan umum adalah menggunakan menarik perhatian dengan memanfaatkan media massa yang digunakan pada saat itu. Salah satu media massa yang digunakan adalah siaran televisi. TVRI atau Televisi Replublik Indonesia merupakan naungan dibawah kekuasaan pemerintah Indonesia, dan satu-satunya televisi yang disiarkan di Indonesia. TVRI juga dibawah naungan dengan Deppen. TVRI atau Televisi Replublik Indonesia dijadikan sebagai sarana atau wadah mengumpulkan dan mengamankan hasil suara yang telah dikumpulkan dari pemilihan umum pada masa Orde Baru tahun 1977.

Konsep Rencana Operasi Penerangan atau Renopen dilakukan dengan melalui empat tahap. Tahap tersebut merupakan materi dari hasil pembangunan dalam Repelita jilid ke-1 yang berisikan jangkauan yang besar (Karlina, 2014). Dalam tahap kesatu sampai keempat, terdapat hal yang diprioritaskan antara lain materi dari hasil pembangunan tersebut dan Repelita. Adanya pembagian jangkauan besar yang mencakup aspek hasil pembangunan, tujuan dari pembagian tersebut yakni pemberian simpati kepada rakyat Indonesia dengan tujuan untuk memilih Golkar yang merupakan kepanjangan dari golongan rakyat dalam Pemilu dan diharapkan Golkar atau kepanjangan dari golongan rakyat memenangkan hasil pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1977.

Dalam jadwal tahapan rencana operasi penerangan, Televisi Replublik Indonesia atau TVRI melakukan rencana dari Renopen dengan melalui tiga tahap. Langkah yang pertama, rencana tersebut dilaksanakan pada tahun Maret 1975. Langkah yang mereka lalui dilakukan dengan cara menyusun program serta bahan liputan untuk disiarkan di televisi dengan hal yang berkaitan laporan hasil pembangunan pemerintah pada masa Orde Baru. Tahap ini efisien dalam menarik perhatian rakyat Indonesia untuk memilih Golkar dalam pemilu. Terkait pelaksanaan dari tahap kesatu mengenai program yang dibuat akan disiarkan pada televisi sekitar tahun Juni 1973 di TVRI dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh petugas penyiaran Televisi Rakyat Indonesia dan pemerintah pada masa Orde Baru. Program mengenai rencana tersebut berjalan dengan semestinya hingga mengalami kenaikan jadwal penayangan di televisi dan menjadi program acara sehari-hari. Fenomena tersebut terjadi pada tahun 1975 dimana acara program pembangunan sudah menjadi acara sehari-hari di televisi khususnya tayang di Televisi Replublik Indonesia atau TVRI.

Tahap kedua mengenai rencana dari operasi penerangan dari Deppen, hal yang dilakukan adalah terkait dalam pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru. Jadwal dari pelaksanaan tahap kedua dimulai dari tahun Januari 1976. Acara yang disiarkan dalam program TVRI pada saat itu adalah kegiatan dan hasil dari pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Dalam siaran tersebut juga ada edukasi dari pemerintah mengenai aturan serta

tata laksana untuk melakukan aksi pemilihan umum atau pemilu. Dalam siaran tersebut juga terdapat beberapa lagu-lagu dan gendang-gending yang berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilu. Rencana yang terdapat di tahap kedua dalam rencana Operasi Penerangan juga adanya siaran mengenai logistik atau pengiriman bahan dan barang untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Rencana tersebut juga dapat dilakukan untuk mendapatkan simpati dari rakyat terutama rakyat kalangan bawah (Gianty, 2017). Program acara siaran yang dilakukan juga selain membahas edukasi mengenai pelaksanaan pemilihan umum, juga menyiarkan dari hasil pembangunan yang dilaksanakan beberapa daerah supaya menarik simpati bahwa pemerintah memiliki keadilan dalam membangun pembangunan (Setiawan, 2015).

Tahap selanjutnya dari yang ketiga, tahapan ini dilakukan pada tahun selanjutnya yakni tahun 1977. Pelaksanaan dari tahapan tersebut terjadi menjelang dari pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Pada tahap ini, program acara televisi yang disiarkan oleh TVRI atau Televisi Rakyat Indonesia ditayangkan lebih memanas dan kompleks mengenai hasil pembangunan di beberapa daerah. Hasil yang ditayangkan dalam acara program tersebut bisa berupa materi dari video yang sudah dipotong, kumpulan hasil film pembangunan yang sudah disiapkan untuk disajikan dengan bentuk laporan, serta beberapa laporan juga yang sudah dikhususkan untuk persiapan ketika menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu (Faquhuddin et al., 1977). Pada wewenang dari kekuasaan TVRI juga diberi hak untuk menyiarkan tayangan dari proses hasil pemilihan umum secara langsung dan resmi. Masa kampanye pada saat itu, beberapa partai seperti Golkar, PDI, dan PPP mendapatkan jatah penayangan yang lebih banyak sebanyak dua kali tayang dalam waktu sebulan. Pada masa kampanye saat itu, mengenai siaran tentang laporan hasil pembangunan di beberapa daerah masih disiarkan. Salah satu contoh dari hasil pembangunan yang disiarkan dengan nama "Kampanye Bayangan" yang menayangkan dari partai Golkar serta perubahan yang nyata dari periode Orde Baru. Partai Golkar memiliki keuntungan lebih yakni memperoleh hak yang sama meskipun sudah kedua partai politik dari peserta pemilu atau pemilihan umum. Siaran yang mereka siarkan mendapatkan sebuah keuntungan untuk menarik simpati masyarakat.

Penayangan dari program acara televisi TVRI mengalami keseringan jadwal tayang di bagian laporan hasil pembangunan di beberapa daerah oleh beberapa partai politik. Acara penayangan tersebut ditayangkan mulai jam 19:44 - 20.00 WIB. Penayangan tersebut hampir dilakukan setiap hari selama menjelang pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Hasil jam tayang mulai mengalami perkembangan penambahan jam tayang mengenai hasil pembangunan di beberapa daerah terjadi pada bulan Maret yang bisa disiarkan sebanyak dua puluh kali jam tayang di hari yang berbeda (Massa, 2022). Kemudian mengalami penambahan jam tayang hingga sebanyak dua delapan kali pada hari yang berbeda. Siaran tersebut juga ditayangkan pada hari Minggu, jadwal tersebut dimulai dari 26 Juni hingga 3 Juli, mengenai acara program hasil pembangunan dalam bentuk laporan juga disiarkan. Tema yang disiarkan berupa laporan tidak berkurang dan melakukan pemotongan beberapa video dari hasil pembangunan di beberapa daerah dan dokumentasi mengenai proses pembangunan. Acara program yang disiarkan di televisi selain membahas pembangunan di beberapa daerah juga membahas kegiatan presiden kedua yakni Soeharto sebagaimana beberapa aktivitas disiarkan, salah satunya adalah aktivitas hariannya memancing. Beliau juga memberi arahan edukasi mengenai proses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Pada periode tersebut juga terdapat kesenjangan antara partai politik pada masa Orde Baru.

B. Perbedaan Pola Politik yang Tersirat dalam Siaran Televisi pada Periode Orde Baru dan Reformasi

Pada masa Orde baru yang dikuasai oleh Presiden Soeharto, media massa yang digunakan khususnya siaran televisi, memiliki perkembangan yang berbeda dengan masa

reformasi. Dalam masa Orde Baru, lingkungan industri bidang pertelevisian dianggap lebih memihak kekuatan dari pemerintah. Politik yang tersirat dalam siaran televisi juga sering ditayangkan di televisi. Kehidupan sosial yang dijalani juga tidak seimbang dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pada masa Orde Baru, sebagai rakyat Indonesia dianggap tidak boleh menyuarakan pendapat yang berhubungan dengan penentangan pemerintah dalam bentuk apapun. Ada beberapa pendapat jika melawan dianggap tidak mendukung sepenuhnya pemerintah. Namun respon masyarakat dan pergerakan perkembangan dunia pertelevisian dengan mengikuti tahun mengalami perubahan. Sebelumnya Indonesia hanya memiliki satu siaran televisi yakni TVRI atau kepanjangan dari Televisi Replublik Indonesia. Siaran tersebut menurut masyarakat dianggap mendukung propaganda pemerintah baik itu kepemimpinan hingga ketidakseimbangan persaingan yang sehat dengan partai politik. Hal tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan teknologi yang juga berkembang pesat. Salah satu bukti dari dampak perkembangan teknologi pada masa itu yakni munculnya beberapa televisi-televisi milik swasta. Televisi swasta muncul dari harapan masyarakat dengan adanya pembaharuan dari jenis acara siaran yang ditayangkan dalam bentuk berbeda. Salah satu siaran televisi dari milik swasta adalah RCTI yang merupakan kepanjangan dari Rajawali Citra Televisi Indonesia. Rajawali Citra Televisi Indonesia (TVRI) lahir pada tahun 1989. Rajawali Citra Televisi Indonesia hadir sebagai televisi milik swasta perdana di Indonesia (Fajri & Kom, 2015). Pada masa awal dari siaran televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia ini, dapat menarik perhatian kepada masyarakat untuk memiliki keinginan untuk menonton televisi. Rajawali Citra Televisi Indonesia merupakan saluran televisi yang harus menggunakan prabayar atau langganan. Meski menjadi siaran televisi milik swasta, Rajawali Citra Televisi Indonesia sukses menjadikan peringkat pertama dari penghargaan siaran hiburan di seluruh Indonesia.

Mengetahui hal ini, menarik perhatian bagi para kalangan lainnya untuk menjadikan televisi sebagai persaingan ekonomi di Indonesia. Kesuksesan Rajawali Citra Televisi Indonesia memicu tumbuhnya dari beberapa saluran televisi milik swasta lainnya. Televisi milik swasta yang muncul lainnya adalah Metro TV. Metro TV lahir pada 25 November 2000. Pemimpin dari siaran televisi Metro TV adalah Surya Paloh. Keunggulan dari Metro TV adalah siaran yang ditayangkan lebih banyak bisa dijangkau hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Keunggulan lainnya mengenai Metro TV adalah selalu tayangnya Metro TV yakni selama 24 Jam untuk setiap hari. Acara program televisi yang direncanakan oleh Metro TV hanya berupa acara berita dan pelaporan saja. Namun dengan perkembangannya Metro TV mempertimbangkan dengan memasukan beberapa program acara yang bersifat menghibur ringan. Dengan keunikannya dalam berbahasa, Metro TV juga menyajikan program acara dengan berbahasa Mandarin dan merupakan stasiun pertama di Indonesia yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai pembawa dalam program acara televisi. Prestasi lainnya yang diraih oleh Metro TV adalah siaran televisi pertama yang menyajikan dalam bahasa inggris dalam program acara dan program televisi tersebut dapat dilihat oleh seluruh dunia (Yusuf, 2016).

Perkembangan televisi di Indonesia sudah makin berkembang, akibat dari kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dan negatif. Salah satu dampak negatif dari kemajuan siaran televisi di Indonesia adalah tontonan yang tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak dan hanya untuk orang dewasa (Respati, 2013). Tontonan seperti itu dianggap dapat menurunkan moralitas sebagai masyarakat yang beradab. Beberapa sikap tidak terpuji seperti konsumtif, kekerasan, perbuatan buruk lainnya juga berkembang dan tidak mudah untuk disaring siarannya (Gafari, 2008). Keadaan tersebut membuat keterpurukan masyarakat untuk menonton televisi dengan aman dan nyaman (Massa, 2022). Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh DPR atau dewan perwakilan rakyat yang mendukung suara rakyat untuk mengganti aturan penyiaran televisi di Indonesia. Sesuai dengan pengeluaran edaran Rancangan Undang-Undang Penyiaran pada tahun 2022 dengan minta menggantikan regulasi penyiaran televisi yang terkait dalam UU Penyiaran No.24 tahun 1997. Hasil dari perundingan tersebut mendapatkan hasil yang tidak memuaskan bagi

masyarakat karena banyaknya pihak yang tidak menyetujui dari perubahan regulasi dalam penyiaran televisi di Indonesia.

Propaganda yang tersirat dalam penyiaran televisi pada saat itu masih berlanjut serta konflik mengenai regulasi penyiaran televisi di Indonesia juga belum tuntas pada saat itu masih mengalami perdebatan. Pihak yang menolak dari perubahan regulasi penyiaran televisi di Indonesia karena dengan argumen dianggap sebagai diskriminatif yang dapat menghambat perkembangan di bidang media elektronik terutama televisi. Bagi pihak yang pro mengenai permasalahan perubahan regulasi, golongan tersebut karena berpendapat bahwa dapat menghambat pemasukan ekonomi dalam bidang bisnis penyiaran televisi di Indonesia. Setelah melewati banyak perdebatan hingga setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang berubah menjadi Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2022. Konflik mengenai sengketa belum padam. Pemerintah juga terlibat dalam konflik tersebut khususnya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI (Armando, 2017). Kejadian tersebut bahwasannya kekuatan dari siaran televisi dapat diukur dengan kepemimpinan seseorang dan berpengaruh dalam negeri (Ahmad Muthohar, n.d.). Salah satu contohnya adalah siaran mengenai sakitnya Presiden Soeharto. Beliau semasa sakit mendapatkan perhatian dari pihak televisi dan disiarkan secara berlebihan. Keseimbangan dan keadilan dalam membuat sebuah berita mengenai presiden Soeharto tidak bersifat adil danimbang.

Salah satu program acara yang ditayangkan secara berlebihan pada masa Orde Baru adalah kisah dari kerabat dengan orang-orang terdekat dari keluarga Cendana. Peliputan media yang terus menerus membahas sosok kepemimpinan Presiden Soeharto dengan tidak seimbang dengan kebutuhan pendidikan, hiburan, dan lainnya membuat hasil analisa oleh kritikus di bidang ahli media bahwa adanya hubungan yang kuat antara pemilik siaran televisi dengan pemimpin Negara Indonesia pada saat itu. Penayangan media televisi yang bersifat monopolistik memiliki dampak kepada masyarakat terutama pada kalangan rakyat miskin. Kurangnya mendapatkan ragam informasi yang mendidik karena keseluruhan konten dalam penayangan televisi hanya memihak untuk memperoleh keuntungan kepemilikan media saja. Pada itulah masa reformasi membuat sebuah keputusan untuk melakukan aksi suara dalam bentuk untuk perubahan regulasi kepemilikan media agar konten yang dibuat dapat bermanfaat dan bersifat adil serta seimbang. Salah satu aksi yang dapat dilakukan sebagai wujud Negara yang menjunjung demokratis, penyiaran televisi dapat dilakukan secara desentralisasi. Desentralisasi yang dilakukan dapat dengan cara memberikan dan menuruti apresiasi masyarakat di daerah untuk membangun lembaga penyiaran yang berdasarkan dengan adat istiadat, norma, budaya setempat supaya dapat bersifat beragam.

Pada masa Orde Baru, masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai hanya menjadi penonton diam dalam acara televisi tersebut. Masyarakat juga dijadikan sebagai objek penanaman sebuah ideologi otoritarisme. Ideologi politik tersebut sangat jauh dengan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika dan Demokratis. Pada masa Reformasi lahir dari jawaban permasalahan yang dihadapi pada saat Orde Baru. Banyaknya perubahan dan kebebasan dalam penyiaran dan penyebaran serta berpendapat mengenai pemerintah. Perubahan ini cukup pesat dalam bidang konten yang tersirat dalam siaran televisi. Makna yang tersirat paling bisa kita analisa adalah politik. Pada masa reformasi, siaran yang ditayangkan bersifat fleksibel dan tidak adanya ancaman mengenai berpendapat mengenai pemerintah. Siaran yang ditayangkan juga beragam bidangnya tidak hanya berfokus pada sistem politik pada Indonesia yang berbeda pada masa Orde Baru dengan seringnya penayangan kegiatan politik dan propaganda yang terbungkus dalam konten siaran televisi.

Simpulan

Televisi merupakan bentuk dari teknologi berupa media massa yang menampilkan tampilan visual video (gambar dinamis) atau gambar (gambar statis) dan suara dalam bentuk kotak atau wadah yang berkesinambungan dengan sinyal satelit dan kabel. Televisi pertama kali diciptakan oleh John Logie Baird pada 13 Maret 1888. Pembuatan televisi karena terinspirasi dari maraknya radio pada saat itu. Televisi dianggap sebagai kemajuan peradaban manusia dan hiburan bagi masyarakat (Calabrich, 2016). Acara televisi memiliki jam tayang yang berbeda-beda sesuai dengan jam kegiatan manusia dan selaras dengan kebutuhan publik. Jenis acara televisi yang ditayangkan yakni berita, kartun, hiburan komedi, ritual tradisi agama, dan lain-lain. Bentuk televisi juga menyeimbangkan dengan zaman yang berlaku, pada masa orde baru televisi masih dalam bentuk televisi tabung. Televisi memiliki dampak positif dan negatif kita sebagai masyarakat Indonesia dapat lebih bijak menyaring siaran acara televisi baik untuk individu dan keluarga serta lingkungan. Komunikasi yang nyata dan efektif juga merupakan dampak dari adanya televisi. Kejadian seluruh dunia dapat disiarkan di televisi dan mudahnya informasi dari luar ke dalam negeri bahkan terjadinya proses globalisasi. Penyiaran TV dilakukan dengan memerlukan sinyal VHF dan UHF agar dapat memasuki acara televisi yang diinginkan. Berbeda dengan zaman sekarang yang menganggap televisi merupakan aksesoris perabotan rumah, sebelum reformasi terjadi, masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam menonton televisi. Beberapa Masyarakat masih menetapkan budaya menonton televisi bersama dengan warga atau di tempat perkumpulan masyarakat. Berbeda dengan masa kini cenderung menonton siaran melalui siaran langsung dalam gadget. Masa Orde Baru masih jarangunya penduduk Indonesia yang memiliki televisi, karena harga yang cenderung mahal sehingga hanya beberapa warga saja yang sudah bisa memiliki televisi. Televisi pertama kali tayang di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1962. Acara yang disiarkan merupakan upacara bendera merah putih di Istana Negara dengan sebagai memperingati HUT kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1977, keadaan politik pada saat itu belum ada perubahan yang signifikan bagi sosial, kemudian Deppen membuat sebuah rancangan aturan baru mengenai penarikan suara dalam pemilihan umum. Konsep yang dibuat Deppen merupakan Konsep Rencana Operasi Penerangan (Renopen) yang dilakukan untuk pemilihan umum atau pemilu. Rencana ini dianggap berpengaruh besar terhadap kekuasaan presiden Soeharto. Isi dari rencana tersebut berupa kumpulan strategi dalam mengamankan suara yang terkumpul dari pemilihan umum. Salah satu cara yang digunakan dalam salah satu strategi Konsep Rencana Operasi Penerangan atau Renopen untuk mengamankan suara yang dihasilkan dari pemilihan umum adalah menggunakan menarik perhatian dengan memanfaatkan media massa yang digunakan pada saat itu. Salah satu media massa yang digunakan adalah siaran televisi. TVRI atau Televisi Replublik Indonesia merupakan naungan dibawah kekuasaan pemerintah Indonesia, dan satu-satunya televisi yang disiarkan di Indonesia. TVRI juga dibawah naungan dengan Deppen. TVRI atau Televisi Replublik Indonesia dijadikan sebagai sarana atau wadah mengumpulkan dan mengamankan hasil suara yang telah dikumpulkan dari pemilihan umum pada masa Orde Baru tahun 1977.

Penayangan dari program acara televisi TVRI mengalami keseringan jadwal tayang di bagian laporan hasil pembangunan di beberapa daerah oleh beberapa partai politik. Acara penayangan tersebut ditayangkan mulai jam 19:44 - 20.00 WIB. Penayangan tersebut hampir dilakukan setiap hari selama menjelang pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Hasil jam tayang mulai mengalami perkembangan penambahan jam tayang mengenai hasil pembangunan di beberapa daerah terjadi pada bulan Maret yang bisa disiarkan sebanyak dua puluh kali jam tayang di hari yang berbeda (Massa, 2022). Kemudian mengalami penambahan jam tayang hingga sebanyak dua delapan kali pada hari yang berbeda. Siaran tersebut juga ditayangkan pada hari Minggu, jadwal tersebut dimulai dari 26 Juni hingga 3 Juli, mengenai acara program hasil pembangunan dalam bentuk laporan juga disiarkan (Freddy H. Istanto, 1999). Tema yang disiarkan berupa laporan tidak berkurang dan melakukan pemotongan beberapa video dari hasil pembangunan di beberapa daerah dan dokumentasi mengenai proses pembangunan. Acara program yang disiarkan di televisi selain membahas pembangunan di beberapa daerah juga membahas kegiatan presiden kedua yakni Soeharto sebagaimana beberapa aktivitas disiarkan, salah satunya

adalah aktivitas hariannya memancing. Beliau juga memberi arahan edukasi mengenai proses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Pada periode tersebut juga terdapat kesenjangan antara partai politik pada masa Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai hanya menjadi penonton diam dalam acara televisi tersebut. Masyarakat juga dijadikan sebagai objek penanaman sebuah ideologi otoritarisme. Ideologi politik tersebut sangat jauh dengan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika dan Demokratis. Pada masa Reformasi lahir lah dari jawaban permasalahan yang dihadapi pada saat Orde Baru. Banyaknya perubahan dan kebebasan dalam penyiaran dan penyebaran serta berpendapat mengenai pemerintah. Perubahan ini cukup pesat dalam bidang konten yang tersirat dalam siaran televisi. Makna yang tersirat paling bisa kita analisa adalah politik. Pada masa reformasi, siaran yang ditayangkan bersifat fleksibel dan tidak adanya ancaman mengenai berpendapat mengenai pemerintah. Siaran yang ditayangkan juga beragam bidangnya tidak hanya berfokus pada sistem politik pada Indonesia yang berbeda pada masa Orde Baru dengan seringnya penayangan kegiatan politik dan propaganda yang terbungkus dalam konten siaran televisi.

DAFTAR PUSTAKA

6. *Televisi Komunitas, Media Pemberdayaan Masyarakat - Budhi Hermanto.* (n.d.).
- Ahmad Muthohar, A. R. (n.d.). *RELASI MEDIA MASSA DAN POLITIK Studi Peran Televisi dalam Dinamika Politik di Indonesia.*
- Alkhajar, E. N. S. (2011). Televisi dan Energi Pembangun Bangsa. *Komunikasi Massa*, 4(1), 107–118.
- Armando, A. (2017). Kegagalan Televisi Berjaringan dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 25–34.
- Calabrich, S. L. (2016). Learners' Perceptions of the Use of Mobile Technology in a Task-Based Language Teaching Experience. *International Education Studies*, 9(12), 120–136.
- Fajri, C., & Kom, S. I. (2015). Fungsi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dalam Membentuk Ruang Publik. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 3(1).
- Faqihuddin, O., Utomo, A., Sejarah, P. I., Sejarah, J. P., & Ilmusosial, F. (1977). *TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEDIA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM 1977 TVRI AS A MEDIA FOR POLITICAL PROPAGANDA IN 1977 GENERAL ELECTION Hermin Indah Wahyuni*, *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Telev.* 178–191.
- Freddy H. Istanto. (1999). Peran Televisi Dalam Masyarakat Citraan Dewasa Ini Sejarah Perkembangan Dan Pengaruhnya. *Nirmana*, 1(2), 95–108. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/dkv/article/view/16045>
- Gafari, M. (2008). Kekerasan dalam media massa televisi. -.
- Gianty, G. (2017). Hak cipta dan penggunaan kembali : Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah , memperbaiki , dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial , selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat ya. *Journal of Experimental Psychology: General*, 136(1), 23–42. <http://kc.umn.ac.id/5548/1/BAB II.pdf>
- Hadi, D. W., & Kusuma, G. (2006). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Jurnal Sosioteknologi*, 1, 40–50. [www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal propaganda_dwiwahyonohadi.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal%20propaganda_dwiwahyonohadi.pdf)
- Hermanto, B. (2007). Televisi Komunitas: Media Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi*, 2(1), 243–252.

- Karlina, L. (2014). Dampak Pemberitaan Infotainment di Televisi dalam Industrialisasi Media terhadap Perilaku Etika di Masyarakat. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 189–196.
- Kurniady, I., & Sazali, H. (2022). KAJIAN LITERASI MEDIA DALAM KIPRAH PERTELEVISIAN PASCA ORDE BARU (PRESPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM). *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 5(1), 17–29.
- Massa, M. (2022). *Kajian Literasi Media Kiprah Pertelevisian Pasca Orde Baru dalam Perspektif Komunikasi Islam Media Literacy Study of Post-New Order Television Gait in Islamic Communication Perspective*. 5(1).
- PRAMESWARI, F. (2009). *DINAMIKA PERUBAHAN PERAN TVRI DALAM TRANSISI POLITIK DI INDONESIA (Studi Kasus TVRI Jawa Timur Era Orde-Era Reformasi)*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Respati, W. (2013). Media Literasi: Upaya Bijak Menyikapi Terpaan Tayangan Televisi. *Humaniora*, 4(1), 619–631.
- Setiawan, I. (2015). Budaya televisi di indonesia: wacana dan kepentingan ideologis dari dua periode. *Lakon: Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya*, 4(1), 56–79.
- Tabrani, P. (1992). Semiotika dan bahasa rupa gambar. *Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya LPUI dan Lingkaran Peminat Semiotika*.
- Yusuf, M. F. (2016). Komodifikasi: Cermin Retak Agama Di Televisi: Perspektif Ekonomi Politik Media. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.18326/inject.v1i1.672>